

PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DAN RUANG KELAS BARU DI KABUPATEN SELUMA PASCA PEMEKARAN

Hambali

SD Negeri 1 Seluma Kabupaten Seluma
e-mail: hambali.arif15@gmail.com

Abstract: This article was written to describe the construction of school buildings and classrooms in Seluma post- expansion . Research using qualitative descriptive methods . The data collection is done by observation , interviews and documentation research. The results showed that the construction of school buildings and classrooms in the post- expansion Seluma done based on analysis of community needs . Development using funds provided by local governments and the central government in the form of a special allocation fund (DAK). There are 41 new school construction and more construction of new classrooms in Seluma since 2004. The central government and local governments continue to conduct evaluations and supervision to ensure that the process of construction of school buildings and classrooms run effectively and efficiently .

Keywords : building schools and new classrooms , expansion area , Seluma

Abstrak: Artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat. Pembangunan menggunakan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK). Terdapat 41 pembangunan gedung sekolah baru dan lebih banyak pembangunan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma sejak tahun 2004. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus melakukan kegiatan evaluasi dan supervisi untuk memastikan bahwa proses pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru berjalan secara efektif dan efisien.

Keywords: gedung sekolah dan ruang kelas baru, pemekaran wilayah, Seluma

PENDAHULUAN

Memasuki akhir dekade 90-an Indonesia mengalami perubahan sosial politik yang bermuara kepada pilihan melaksanakan desentralisasi sebagai salah satu model utama pembangunan Indonesia.

Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam PP No.129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah. Dalam PP tersebut, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat (pasal 2 PP 129/2000). Argumentasi untuk ini didasarkan atas beberapa dimensi. Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah.

Kabupaten Seluma sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada saat itu pembangunan masih menginduk ke Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyebabkan proses pembangunan berjalan lamban, sehingga menimbulkan kesan Kabupaten Seluma sebagai daerah tertinggal. Hal ini merupakan salah satu alasan diajukannya proposal

Kabupaten Seluma. Oleh karena itu, maksud dan tujuan pembentukan Kabupaten Seluma adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan dengan masyarakatnya, mempercepat pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten Seluma terus melakukan pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sekaligus merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Tilaar (1992:134-135), bahwasanya salah satu aspek terpenting dalam menyiapkan dan merencanakan arah perkembangan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah Pendidikan. Hal ini relevan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Tujuan pembangunan pendidikan nasional juga diungkapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas tahun 2005-2009, yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan pendidikan nasional adalah meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di suatu wilayah, terutama di daerah otonomi baru. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Standar sarana dan prasarana ini mencakup: (1) kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah, dan (2) kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

Bangunan/gedung sekolah dan ruang kelas merupakan bagian penting dalam sarana dan prasarana pendidikan. Ketersediaan gedung sekolah dan ruang kelas yang nyaman sangat berpengaruh terhadap kelancaran jalannya proses pendidikan itu sendiri. Pengertian bangunan gedung sekolah Indonesia, berlandaskan pada pengertian bangunan gedung menurut Kepmen Kimpraswil nomor 332/KPTS/M2002 tentang pedoman teknis Pembangunan Gedung Negara, adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Bangunan gedung sekolah yang sumber biayanya dari APBN, APBD dan atau sumber lainnya, menjadi bangunan milik negara. Sedangkan ruang kelas adalah fasilitas umum yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, bangunan tersebut harus memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.

Ruang Kelas merupakan salah satu aspek yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Di situ disebutkan bahwa ruang kelas merupakan sebuah tempat proses pembelajaran dan interaksi langsung antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik apabila peserta didik akan merasakan aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran, dan hal ini akan menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik.

Berdasarkan data yang didapat dari Nomenklatur Depdikbud Kabupaten Seluma, jumlah Sekolah Dasar (SD) yang ada di wilayah Kabupaten Seluma sebelum pemekaran adalah 180 unit, jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 20 unit, serta jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah 5 unit. Letak gedung sek

beberapa desa berbeda yang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh, menyulitkan masyarakat khususnya siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Seluma terus melakukan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di beberapa wilayah. Hal ini merupakan wujud dari tujuan pemekaran wilayah kabupaten yaitu agar pembangunan dapat dilakukan secara cepat.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sangatlah penting guna mencapai peningkatan mutu pendidikan. Namun, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ini masih diliputi oleh berbagai masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengetahui pembangunan pendidikan di Kabupaten Seluma, terutama dilihat dari segi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Seluma, terutama sejak menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Selanjutnya, penelitian ini difokuskan pada pembangunan gedung sekolah baru dan pembangunan ruang kelas baru di wilayah Kabupaten Seluma pasca pemekaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Secara umum, rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran?. Sedangkan rumusan masalah khusus adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana visi-misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma tentang pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru pasca pemekaran?
2. Bagaimana perencanaan lokasi pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran?
3. Dari mana sumber dana pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran?
4. Bagaimana usaha aparat pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran?
5. Bagaimana pelaksanaan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran?

6. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran?
7. Bagaimana pemanfaatan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran?
8. Apakah hambatan dalam pemanfaatan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran?

METODE

Dalam usaha menemukan jawaban dari masalah penelitian yang telah dirumuskan, rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data dalam menyajikan laporan, dimana data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen lainnya (Moleong, 2007:15). Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data-data yang berupa informasi tentang pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Seluma sejak awal pemekaran wilayah, khususnya pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru.

Subyek penelitian ini adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Seluma, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, peneliti juga memerlukan data yang melibatkan Pemerintah Daerah serta dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Seluma.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Irawan (2006:101) bahwa satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Selain itu, dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti juga menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu melalui : pengamatan (observasi), wawancara dan studi dokumen.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif yang disampaikan oleh Miles dan Hubberman (1992:39) dimana terda

dalam analisis data kualitatif yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga tahap ini dilakukan sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Kegiatan analisis data dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain : reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi-Misi Pembangunan Gedung Sekolah Dan Ruang Kelas Baru Pasca Pemekaran

Proses pembangunan pendidikan di Kabupaten Seluma telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma. Renstra merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program-program bidang pendidikan sehingga terwujudnya mutu pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing. Rencana strategis pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Seluma menyangkut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang pendidikan oleh seluruh jajaran pendidikan, mulai dari Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sampai pada satuan pendidikan yaitu sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap nara sumber, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Maryono, M.Pd., diketahui bahwa Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma yaitu: Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing. Visi tersebut kemudian diwujudkan melalui Misi sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas dan daya saing serta relevansi lulusan setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Seluma, (2) Terciptanya proses belajar yang aman dan nyaman, (3) Terciptanya model pembelajaran yang efektif dan kreatif, (4) Tuntas wajib belajar 9 tahun, (5) Terlaksananya pembinaan kepemudaan dan olahraga, (6) Terciptanya peran serta/kepedulian masyarakat terhadap pendidikan, dan (7) Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dengan stakeholder.

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa arah dan kebijakan pengembangan pendidikan di Kabupaten

Seluma tidak terlepas dari arah pengembangan pendidikan nasional yaitu : Akses dan pemerataan, accountable, bermutu dan daya saing, yang biasa disebut pendidikan yang meta-accountable dan bermutu. Oleh sebab itu kebijakan pengembangan pendidikan di Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut : (1) Peningkatan akses dan pemerataan, (2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta (3) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. dalam melaksanakan arah dan kebijakan tersebut dengan prioritas utama tuntas wajar 9 tahun disertai dengan prioritas selanjutnya peningkatan mutu, daya saing dan relevansi serta pencitraan publik (akuntabilitas).

Berdasarkan rencana jangka panjang pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Seluma, maka dapat disusun pula rencana operasional tahunan pembangunan bidang pendidikan. Rencana operasional tahunan dikembangkan berdasarkan rencana jangka panjang yang telah disusun oleh pemerintah. Dengan kata lain, rencana operasional tahunan merupakan tindak lanjut dari rencana jangka panjang tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber dalam wawancara, bahwa pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru merupakan wujud dari salah satu Misi Dinas Pendidikan kabupaten Seluma, yaitu “Tuntas Wajib Belajar 9 Tahun”. Dengan kata lain, pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma dilakukan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar lebih banyak anak-anak usia sekolah dapat menyelesaikan pendidikan, yaitu pendidikan dasar dan menengah.

Perencanaan Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dan Ruang Kelas Baru Pasca Pemekaran

Pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru merupakan salah satu rencana operasional tahunan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Pembangunan gedung sekolah dilakukan atas dasar kebutuhan masyarakat akan tersedianya gedung sekolah baru di suatu wilayah. Sedangkan pembangunan ruang kelas baru ataupun kegiatan rehabilitasi ruangan kelas dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan di sekolah tersebut.

Menurut narasumber penelitian, proses perencanaan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di

dimulai dengan adanya masyarakat yang melaporkan kebutuhan mereka akan gedung sekolah dan ruang kelas baru, kemudian pemerintah daerah meninjau langsung ke lokasi yang ditentukan dan melakukan analisis kebutuhan (need analysis) dari masyarakat setempat. Selanjutnya pemerintah baru akan melaksanakan proses perencanaan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di tempat tersebut. Dengan kata lain, tidak ada jangka waktu tertentu dalam melakukan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru, karena semuanya didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru adalah perencanaan lokasi pembangunan. Lokasi merupakan tempat yang dapat dikenali dan dibatasi dimana suatu kegiatan berlangsung atau dapat juga merupakan suatu letak suatu obyek. Salah satu contoh lokasi adalah lokasi gedung sekolah, gedung sekolah ini merupakan tempat yang cukup vital karena merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

Penentuan lokasi sebuah sekolah diutamakan untuk memperhatikan faktor-faktor berikut: faktor aksesibilitas; faktor pola distribusi; faktor kondisi lingkungan; lahan sekolah dan peta pendidikan. Aksesibilitas (kemudahan jarak tempuh) akan mempengaruhi kestrategisan suatu lokasi, karena menyangkut kemudahan untuk menuju lokasi tersebut dari berbagai lokasi yang berada di sekitarnya atau wilayah lainnya.

Sumber Dana Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas Baru Pasca Pemekaran

Seluruh kebijakan pendidikan yang telah diambil tidak terlepas dari reformasi kerangka hukum bidang pendidikan yang diawali dengan amandemen UUD RI 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Melalui amandemen ini, bangsa Indonesia menetapkan bahwa pendidikan tidak lagi hanya sekedar hak warga negara sebagaimana tertulis dalam UUD RI 1945 sebelum amandemen, melainkan lebih dari itu, juga merupakan hak azasi manusia. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib pula membiayainya. Dalam sejarah perjalanan UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen, hanya bidang pendidikan saja

yang ditetapkan alokasi anggarannya sebesar 20 persen dari anggaran dalam APBN dan APBD. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah bertekad untuk memajukan dunia pendidikan, terutama pendidikan dasar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa pembangunan di sektor pendidikan sudah dianggarkan di APBN, termasuk pembangunan fisik seperti pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Anggaran pembangunan ini berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan ke pemerintah daerah atau instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma. Dengan kata lain, Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di wilayah Kabupaten Seluma, termasuk proses penganggaran.

Menurut narasumber penelitian, anggaran untuk pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma bersumber dari APBN, DAK dan APBD. Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana APBN yang disalurkan melalui Kas daerah. Dana alokasi khusus ini diperuntukan untuk kepentingan pembangunan pendidikan di daerah, termasuk pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Sumber dana selanjutnya adalah APBN yang langsung disalurkan kepada pihak ketiga, yaitu pihak pengelola pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Dan yang terakhir adalah dana APBD yang merupakan dana Kas daerah atau dana pendamping yang telah dipersiapkan sebesar 10% dari jumlah Kas daerah tersebut.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Seluma tentu saja memerlukan kerja sama dari segala pihak, begitu juga pembangunan di bidang pendidikan. Mengingat pentingnya pendidikan dalam kemajuan suatu daerah, maka pemerintah perlu memberikan perhatian khusus. Selain itu kerja sama dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam memantau jalannya proses pembangunan ini, disamping pengawasan dari pemerintah pusat tentunya.

Hal ini juga tergambar dari hasil wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma. Yang paling berperan penting

daerah, karena sejak terjadinya pemekaran maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya. Namun, tetap dengan bantuan dan pengawasan dari pemerintah pusat. Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat penting. Dengan demikian pemerintah daerah dapat dengan cepat memantau kebutuhan dan kemajuan yang dicapai dalam proses pembangunan tersebut.

Dalam proses pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan leading sector dalam bidang pendidikan, mengusulkan kepada pemerintah daerah melalui pembahasan anggaran di DPRD. Di dalam rapat tersebut akan diketahui ketersediaan APBD untuk pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga dapat mengusulkan dana pembangunan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dana tersebut dikenal dengan DAK atau APBN. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, maka akan dilaporkan kepada bupati untuk dibuat Surat Keputusan tentang pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru serta sumber dana yang akan digunakan.

Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas Baru Pasca Pemekaran

Pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma dilakukan sebagai wujud pelaksanaan rencana jangka panjang dan rencana operasional tahunan bidang pendidikan di Kabupaten Seluma. Dalam proses perencanaan hingga proses pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru ini melibatkan berbagai pihak. Setiap pihak saling bekerja sama dalam mewujudkan kelancaran proses pembangunan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, sejak terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Seluma sudah dibangun 41 unit gedung sekolah baru. Penambahan jumlah gedung sekolah baru paling banyak pada tingkat SMP yaitu 29 unit. Selanjutnya pada tingkat SMA yaitu 11 unit dan pada tingkat SD hanya terdapat penambahan 1 unit gedung sekolah baru. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran dilakukan berdasarkan kebutuhan. Sebelum

terjadinya pemekaran wilayah, jumlah gedung sekolah untuk tingkat SD di Kabupaten Seluma sudah cukup banyak dan tersebar secara merata di berbagai daerah atau desa di Kabupaten Seluma. Penambahan pembangunan gedung sekolah dasar yang dilakukan pada tahun 2004 menanggapi kebutuhan masyarakat akan adanya sekolah luar biasa.

Hambatan Pembangunan Gedung Sekolah dan Ruang Kelas Baru Pasca Pemekaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di wilayah Kabupaten Seluma. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui beberapa kendala atau hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma pasca pemekaran.

Hambatan pertama yang dialami oleh kontraktor sebagai pihak ketiga adalah belum adanya dana dari pemerintah daerah sebagai penanggung jawab proyek pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Ketidakterediaan dana mengakibatkan pihak kontraktor belum mendapatkan uang muka untuk melaksanakan proyek tersebut. Uang muka belum keluar bisa jadi kendala bagi kontraktor atau pemborong proyek dengan modal 0 atau kecil karena untuk memulai sebuah proyek yang sudah ditentukan rentang waktunya diperlukan biaya minimal sebagai modal pekerjaan persiapan seperti pembersihan lahan, pengurusan izin-izin, pembuatan bedeng kerja dan sejenisnya sehingga apabila uang muka bangunan belum cair bisa jadi kendala dalam proses pelaksanaan. Untuk mengatasi kendala tersebut maka para kontraktor akan mencari modal pinjaman untuk memulai pekerjaan, dan tentu saja ini menyulitkan pihak ketiga.

Selanjutnya, izin mendirikan bangunan yang belum selesai juga dapat menjadi kendala. Seringkali pengurusan IMB dilakukan oleh pemilik proyek langsung lalu membuat kontrak kerja dengan kontraktor dengan waktu mulai pekerjaan yang sudah ditentukan namun ternyata pada saat pelaksanaan mulai ternyata IMB belum keluar. Hal ini tentu dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan proyek pembangunan gedung yang apabila tetap dijalankan kemungkinan akan di segel dan tidak boleh melanjutkan pekerjaan sampai pembayaran denda IMB

masalah tersebut bisa bekerja sama dengan profesional yang berkompeten dalam bidang pengurusan Izin mendirikan bangunan karena selain berpengetahuan juga sudah menjalin hubungan baik dengan pihak terkait sehingga tidak ada alasan untuk dipersulit keluarnya IMB

Hambatan terakhir yang ditemukan dalam pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru adalah pertentangan dari masyarakat. Pertentangan dari masyarakat sekitar lingkungan proyek bisa juga terjadi pada sebuah gedung yang pembangunannya tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga sekitar, jika menyangkut urusan kehilangan nafkah harian maka bisa dipastikan akan ribut misalnya lokasi yang akan dibangun merupakan lahan perdagangan warga oleh karena itu perlu bekerjasama dengan masyarakat dan pemimpin warga setempat untuk memikirkan solusi dan mencari jalan keluar bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pemberian akses warga untuk menjadi tenaga kerja proyek bisa jadi solusi untuk menggantikan lahan pekerjaan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan tentu banyak sekali permasalahan yang timbul pada proyek bangunan gedung baik yang bersifat teknik maupun non teknik dari awal mulai sampai dengan berakhirnya proyek karena melaksanakan proyek itu sendiri sudah termasuk menyelesaikan masalah dari tidak adanya gedung menjadi ada.

Pelaksanaan program pembangunan, khususnya pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru yang dilakukan di Kabupaten Seluma tentu saja dilanjutkan dengan proses evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembangunan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal. Evaluasi dalam pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru dapat ditinjau dari beberapa hal, misalnya kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, kerja sama antara pihak yang terlibat, kesesuaian pengalokasian anggaran pembangunan, hingga pemanfaatan gedung sekolah dan ruang kelas setelah dibangun.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma. Melalui proses evaluasi, pemerintah dapat

mengetahui setiap pencapaian yang telah dilakukan maupun kekurangan-kekurangan yang masih memerlukan perbaikan. Selain itu, setelah proses pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru selesai dilakukan, proses evaluasi akan berlanjut pada pemanfaatan gedung sekolah dan ruang kelas baru tersebut.

Penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Termasuk dengan pemanfaatan bangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, narasumber penelitian menyatakan bahwa setiap kepala sekolah dianjurkan untuk mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang berhubungan dengan penanganan sarana dan prasarana sekolah diberi tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma, terdapat beberapa jenis kerusakan pada sarana dan prasarana pendidikan khususnya bangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru tersebut menjadi salah satu hambatan bagi warga sekolah dalam memanfaatkan bangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Rendahnya kualitas pengerjaan yang membuat bangunan tersebut cepat rusak merupakan hambatan utama dalam pemanfaatan bangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru.

Selain itu, kurang cermatnya proses analisa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum melakukan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru mengakibatkan masalah lain dalam pemanfaatan gedung sekolah dan ruang kelas baru tersebut. Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa perencanaan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru didasari pada adanya permintaan masyarakat setempat. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan proses analisa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, berupa analisa lokasi pembangunan dan jumlah anak usia sekolah yang ada di wilayah tersebut.

Kurang cermatnya proses analisa ini mengakibatkan bangunan gedung sekolah dan ruang kelas yang baru

dapat dimanfaatkan dengan baik. Penyebab pertama, karena lokasi sekolah yang kurang strategis sehingga membuat masyarakat cenderung memilih sekolah lain yang letaknya lebih strategis atau dekat dengan pemukiman warga dan mudah dijangkau. Hal ini juga disebabkan oleh letak bangunan gedung sekolah baru yang terlalu dekat dengan sekolah lainnya, sehingga kecenderungan jumlah siswa yang sedikit dapat saja terjadi.

Selain itu, pemerintah daerah tidak memperhatikan peta pendidikan saat melakukan perencanaan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Hal ini mengakibatkan adanya pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di wilayah yang hanya memiliki sedikit anak-anak usia sekolah. Sehingga menyebabkan terbengkalainya bangunan gedung sekolah dan ruang kelas yang baru saja didirikan di wilayah tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma yaitu “Tuntas wajib belajar 9 tahun”. Hal ini dilakukan untuk menampung lebih banyak lagi anak-anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Seluma pasca pemekaran. Perencanaan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma dilakukan berdasarkan usulan dari masyarakat yang membutuhkan. Dari usulan tersebut pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, melakukan analisis terhadap kebutuhan masyarakat tersebut. Barulah selanjutnya akan merencanakan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di wilayah yang diusulkan. Dalam pelaksanaan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru, hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dalam pelaksanaan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma menggunakan anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat atau APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana dari daerah yaitu APBD. Pembahasan anggaran pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru dilakukan dalam rapat pembahasan anggaran di DPRD. Setelah

itu akan dilaporkan kepada bupati. Kemudian proses pembangunan diawasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma. Semenjak pemekaran wilayah Kabupaten Seluma pada tahun 2003, telah terjadi pembangunan gedung sekolah baru sebanyak 41 unit, dan penambahan ruang kelas baru di beberapa sekolah yang membutuhkan. Hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma cenderung bersifat teknis, seperti masalah izin mendirikan bangunan dan ketersediaan dana. Pemerintah pusat dan daerah terus melakukan kegiatan pengawasan sejak proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, hingga pemanfaatan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Hal ini dilakukan agar pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di wilayah Kabupaten Seluma dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam proses pengawasan pemanfaatan gedung sekolah dan ruang kelas baru, pemerintah terhambat dengan buruknya sistem pelaporan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengusulkan beberapa saran untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Seluma, khususnya melalui pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma hendaknya terus melakukan inovasi dan pembaharuan dalam penentuan Visi dan Misi, yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat sehingga dapat mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, hendaknya benar-benar melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan agar pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di wilayah Kabupaten Seluma dilakukan berdasarkan kebutuhan, sehingga pembangunan benar-benar merata di setiap wilayah.
3. Analisis yang mendalam dalam perencanaan anggaran per

- sekolah dan ruang kelas baru juga hendaknya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan anggaran dengan tepat.
4. Pemerintah dan masyarakat hendaknya bekerja sama dengan baik dalam proses pendanaan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di wilayah Kabupaten Seluma. Kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
 5. Pemerintah daerah hendaknya terus melakukan pengamatan dan analisa terhadap kebutuhan masyarakat akan tersedianya gedung sekolah dan ruang kelas baru untuk menunjang proses pembelajaran.
 6. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik dengan pemerintah pusat, terutama dalam proses pendanaan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru, agar dapat memperkecil hambatan dalam proses pembangunan.
 7. Pemerintah daerah hendaknya bekerja sama dengan pihak sekolah dalam pengawasan pemanfaatan gedung sekolah dan ruang kelas baru di Kabupaten Seluma. Selain itu, masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk memanfaatkan bangunan gedung

sekolah dan ruang kelas baru tersebut dengan baik.

8. Pemerintah daerah hendaknya memberikan sosialisasi dan pemahaman yang cukup kepada masyarakat dan pihak sekolah atas pentingnya melaporkan keadaan gedung sekolah dan ruang kelas baru yang telah dibangun agar dapat menghindari penyalahgunaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers
- Tilaar, H.A.R. 1992. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung : Remaja Rosdakarya